

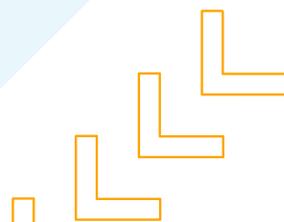
LMCK

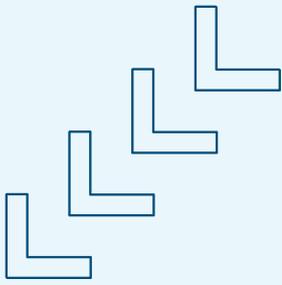
LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

DIREKTORAT PRASARANA
TRANSPORTASI JALAN

2024

TRIWULAN I





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2024





**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penyusun Data Kepegawaian	17 / 04 ²⁴	
2.	Diperiksa	Fitroh,S.ST, MT	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	17 / 04 ²⁴	
3.	Disetujui	Toni Tauladan, S.Si., M.T.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	18 / 04 ²⁴	



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	M. Alhafiq Wahyu Nabillah, S.T	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan, Seksi Rancang Bangun Terminal	17/04/24	
2.	Diperiksa	Susiani,A.Md LLAJ, ST, MT	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	17/04/24	
3.	Diperiksa	Y Prihantoko, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	17/04/24	
4.	Disetujui	Rudy Arya Iskandar, S.T., M.Sc.	Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	18/04/24	



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Marta Harika Khuratul Aini Fadli	Ahli Pertama - Statistisi, Seksi Rancang Bangun PKB	17/09	
2.	Diperiksa	Dluha My Praba, MT	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	18/09	
3.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.MTr.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	17/09	
4.	Disetujui	Eriza Putra, S.Si, M.M.	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	18-09-2024	



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penyusun Rencana dan Program, Seksi Integrasi Moda	17/24 /04	
2.	Diperiksa	Jekky Hendri, S,Sos	Ketua Tim Kelompok Substansi Integrasi Moda, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	17/24 /04	
3.	Diperiksa	Muhammad Isrofi, ST, M.Tr.AP	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	17/24 /04	
4.	Disetujui	Astri Widiani, A.Md LLAJ, S.E.	Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	18/24 /04	



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Danny Muhammad Muflih, A.Md LLAJ, S.SiT	Penyusun Bahan Usaha, Seksi Pengawasan dan Evaluasi	17/29 /04	
2.	Diperiksa	Diana Septi Rahayu, S.E., M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	18/29 /04	
3.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SiT, M.Si.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	17/29 /04	
4.	Disetujui	Susanty Pertiwi	Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	18/29 /04	

KATA PENGANTAR

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat. Sebagai institusi publik, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2024.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 18 April 2024

Direktur Prasarana Transportasi Jalan



Toni Tauladan, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis tersebut, maka dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024, terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SK \geq 100\%$) dan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq SK < 100\%$).

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2024, Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari **9 (sembilan)** IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat **5 (lima)** IKK dengan **status hijau** dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan **4 (empat)** **status merah** dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$):

1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terealisasi **0,64** (target tahun 2024 sebesar 0,64), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **95,6%** (target tahun 2024 sebesar 81,5) dengan Capaian Kinerja sebesar **117,30%**;
3. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **60,56%** (target tahun 2024 sebesar 53,75%), dengan capaian kinerja sebesar **112,67%**;
4. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terealisasi **82,44%** (target tahun 2024 sebesar 81,75%), dengan capaian kinerja sebesar **100,84%**;
5. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terealisasi sebesar **23,75%** (target tahun 2024 sebesar 24%), dengan capaian kinerja sebesar **101,40%**.

Indikator Kinerja Kegiatan dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$) :

1. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebesar **108** lokasi (target tahun 2024 sebesar 111 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **97,30%**;
2. Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi sebesar **12** lokasi (target tahun 2024 sebesar 13 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **92,31%**;
3. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar **84** (target tahun 2024 sebesar 88), dengan capaian kinerja sebesar **95,45%**;
4. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terealisasi **72,38** (target tahun 2024 sebesar 74), dengan capaian kinerja sebesar **97,81%**;

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran Kinerja adalah sebesar **100,30%** dan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah sebesar **101,68%**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala.



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

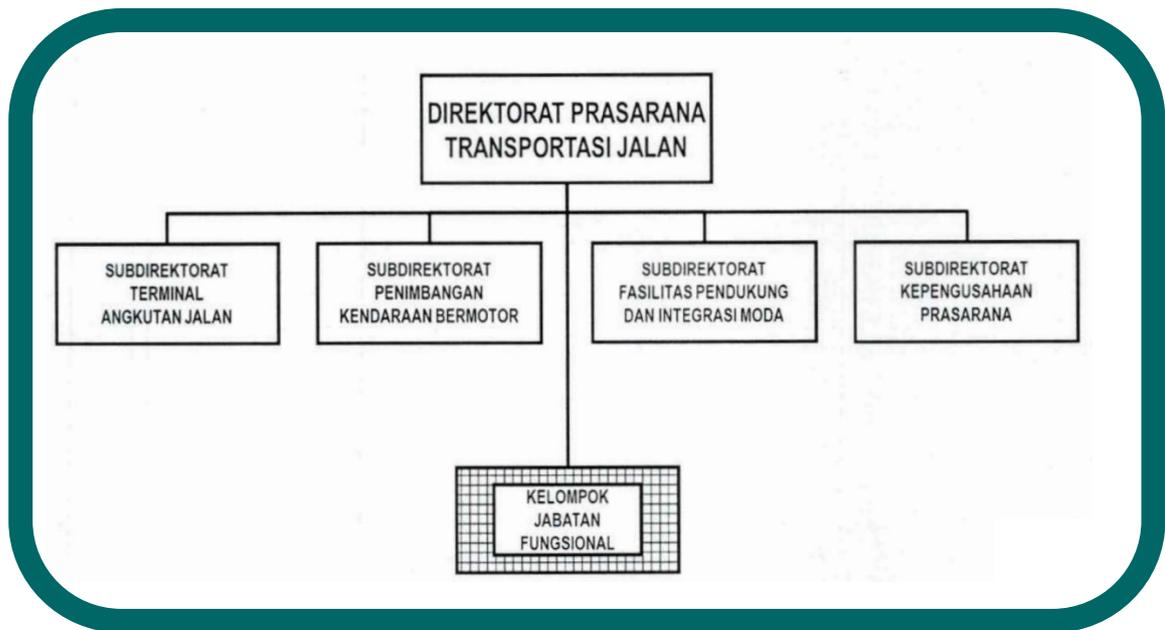
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan;
2. Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
4. Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana;

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Gambar I 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan



I.3 Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan posisi Tahun 2024 diklasifikasikan menurut sub unit kerja sebanyak **89 orang** pegawai, Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I 1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

NO.	SUB UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPPK	PPNPN	JUMLAH
1.	Kelompok Tata Usaha	9	1	-	8	18
2.	Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan	13	-	1	3	17
3.	Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	13	-	1	5	19
4.	Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	14	1	-	4	19
5.	Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana	11	-	1	4	16
Jumlah		60	2	3	24	89

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - i Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - ii Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - iii Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - i Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen).
 - ii Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target, sasaran dan tujuan organisasi, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya, meliputi ketersediaan SDM yang ideal sesuai dengan beban kerja yang ada pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Prasarana Transportasi Jalan hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat dengan DIPA Awal Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada T.A. 2024 sebesar Rp99.957.401.000,- dan DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Triwulan I T.A. 2024 sebesar Rp99.957.401.000,-.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah:

- a) Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
- b) Pengoperasian Terminal Penumpang;
- c) ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
- d) Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB;

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Triwulan I Tahun 2024 adalah:

- a) Rencana Strategis;
- b) Perjanjian Kinerja;
- c) Indikator Kinerja Kegiatan;
- d) Pengukuran Kinerja;
- e) Evaluasi Kinerja

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I. 3. Sumber Daya Manusia
- I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I. 5. Sistematika Laporan
- I. 6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

GA Program Infrastruktur Konektivitas

II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

II.2.1.1 IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.2 IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.3 IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2 SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

II.2.2.1 IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2.2 IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2.3 IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3 SK3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat

II.2.3.1 IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4 SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

II.2.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

II.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja

- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2024

II.3.1.1 Pagu Anggaran

- a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
- a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
- a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

II.3.1.2 Refocusing Anggaran Tahun 2024

- a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024
- a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024
- a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024
- a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024

II.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2023

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

- II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024
- II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
- II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
- II.3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- II.3.3.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
- II.3.3.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
- II.3.3.3 Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
3. Rencana Aksi Tahun 2024 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024
5. Lain – lain yang dianggap perlu.

1.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan target indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Sasaran Program Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar dapat bersinergi dalam mendukung tercapainya Sasaran Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0.58	0.61	0.67	0.67	0.70
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	104	104	111	111	114
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	4	9	15	20	25
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	79.50	80.00	80.50	81.00	81.50
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53.57	53.60	53.65	53.70	53.75
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	70.35	71.03	74.15	78.60	83.38
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	50.0	35.0	30.0	25.0	20.0
WA Program Dukungan Manajemen										
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	85	86	87	88	89
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	70	71	72	73	74

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan 2024

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan target kinerja Tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 terdiri dari Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I 3 Rencana Kinerja Tahunan 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2024	
1	SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,70
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	114
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	25
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,50
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	83,38
3	SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	20,0
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89
5	SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektifitas dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran per 1 Januari 2024 sebesar Rp. 99.957.401.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I 4 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,50
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	24,0
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74

Kegiatan

Anggaran

1. Pelayanan transportasi darat	Rp38.406.000.000,00
2. Penunjang teknis transportasi darat	Rp38.674.313.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp22.877.088.000,00



BAB II
AKUNTABILITAS
KINERJA

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dimasa mendatang.

• Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:


$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
4. Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja digunakan Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan Aplikasi *E-Performance*, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel II 1 Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1		
				T	R	C
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						96,53%
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,64	0,64	0,64	100,00%
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111	111	108	97,30%
IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	13	13	12	92,31%
SK2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						110,27%
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,5	81,5	95,6	117,30%
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,75	53,75	60,56	112,67%
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	81,75	81,75	82,44	100,84%
SK3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat						101,40%
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	25	25	31,69	101,40%
SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						95,51%
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	88	83	95,51%
SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						97,81%
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	73	74,58	97,81%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						100,30%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						101,68%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)						5
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						4

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

Jika dilihat lebih detail, pada Tahun 2024, berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari 9 IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 5 (lima) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%) dan 4 (empat) status merah dengan kondisi kurang dari 100% (0%≤IKP<100%).

Selama Tahun 2024, terdiri 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya terdapat 9 (sembilan) IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

- **Uraian Kegiatan**

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi.

Tabel II 2 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,64	
		Target		0,64
		Realisasi		0,64
		Capaian		100,00%
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111	
		Target		111
		Realisasi		108
		Capaian		97,30%
IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	lokasi	13	
		Target		13
		Realisasi		13
		Capaian		92,31%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan.
2. IKK 2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
3. IKK 3. Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda

II.2.1.1 IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 3 Capaian Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Satuan: Rasio
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2024
Target	0,64	
Realisasi	0,64	
Capaian	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah perbandingan jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang direncanakan untuk diakomodir dan dilayani prasarana transportasi jalan.

Jumlah KSN Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah jumlah KSN Prioritas yang di dalam wilayah administrasinya (kabupaten/kota) terdapat prasarana transportasi jalan yang beroperasi.

Simpul prasarana transportasi jalan adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda transportasi jalan yang berupa terminal tipe A, terminal barang serta fasilitas pendukung dan integrasi moda yang berupa halte.

Untuk menghitung IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun}(n)(10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional } (10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang ditetapkan}}$$

Keterangan:

Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk diakomodir akan dilayani prasarana transportasi jalan dan meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar Kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari:

10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

1. KSPN Danau Toba;
2. KSPN Bangka Belitung;
3. KSPN Borobudur;

4. KSPN Bromo Tengger Semeru;
5. KSPN Mandalika;
6. KSPN Labuan Bajo;
7. KSPN Likupang;
8. KSPN Wakatobi;
9. KSPN Morotai;
10. KSPN Raja Ampat.

9 Kawasan Industri (KI)

1. KI Sei Mangkei;
2. KI Galang Batang;
3. KI Bintan Aerospace;
4. KI Sadai;
5. KI Ketapang
6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintan Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;

22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Maminasata;
36. Kendari;
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 0,64 jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 0,64 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.1.** Grafik Capaian IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan.



Gambar II 1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Tahun 2024)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan. Dari total Kawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melayani 83 Kawasan Strategis Nasional.

a) Terminal Penumpang Tipe-A

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia dan KM 100 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia, jumlah Terminal Penumpang Tipe A adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) terminal.

Dari 127 Terminal Penumpang Tipe A tersebut terdapat 55 (lima puluh lima) Terminal Penumpang Tipe A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Kawasan (Lampiran 9) dari 69 (enam puluh sembilan) Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 9 (sembilan) Kawasan Industri (KI), 8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 42 (empat puluh) Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sisanya 72 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.

b) Terminal Barang Untuk Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:

1. KP 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum dan Terminal Transit Penumpang di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
2. KM 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
3. KM 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan;
4. KM 139 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum yang Berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua.

Berikut adalah jumlah Terminal Barang untuk umum sebanyak 7 Terminal, antara lain:

1. Entikong di Kalimantan Barat;
2. Skouw di Papua. (PKN Jayapura)
3. Aruk di Kalimantan Barat;
4. Nanga Badau di Kalimantan Barat;
5. Motaain di Nusa Tenggara Timur;
6. Motamasin di Nusa Tenggara Timur;
7. Wini di Nusa Tenggara Timur;

Dari 7 Terminal Barang untuk Umum yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan tersebut di atas terdapat 1 (satu) Terminal Barang untuk Umum yang telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak 1 (satu) Kawasan (Lampiran 9) dari 69 (enam puluh sembilan) Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 9 (sembilan) Kawasan Industri (KI), 8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 42 (empat puluh) Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sisanya sebanyak 6 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional dan/atau belum beroperasi.

c) Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 (Lampiran 6);
2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (Lampiran 7) dan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (Lampiran 8).

Terdapat penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda berupa halte di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional sebanyak 6 lokasi, yaitu :

1. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika dan Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika (mendukung penyelenggaraan Moto GP tahun 2022);
 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru;
 3. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba;
 4. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur;
 5. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
 6. Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema Buy The Service di Denpasar.
- Narasi Kronologi Target
Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,67 dengan target 47 KSN terlayani oleh simpul Prasarana Transportasi Jalan disesuaikan dengan kegiatan pada DIPA TA 2023 menjadi 0,62 dengan target 43 KSN terlayani simpul Prasarana Transportasi Jalan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan setelah disesuaikan dengan realisasi capaian kinerja dimana terdapat 43 kawasan yang terlayani oleh simpul prasarana transportasi jalan sehingga pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, telah dilakukan revisi target menjadi 0,62 karena belum ada penambahan simpul lokasi baru pada Kawasan Strategis Nasional.
 - Narasi Faktor Keberhasilan

Keberhasilan terhadap kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Tahun 2024 yaitu:

1. Dari 127 Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia sebagaimana diubah dengan KM 100 Tahun 2024 terdapat 55 (lima puluh lima) Terminal Penumpang Tipe A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Kawasan (Lampiran 9) dari 69 (enam puluh sembilan) Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 9 (sembilan) Kawasan Industri (KI), 8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 42 (empat puluh) Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sisanya 72 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.
2. Dalam pelaksanaannya sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dapat terealisasi sebanyak 6 lokasi, yaitu Mandalika, Pekanbaru, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Denpasar. Penambahan realisasi pada akhir tahun 2022, yaitu adanya penambahan pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
3. Adanya Kegiatan Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan dan Survey dan Monitoring Simpul-Simpul Transportasi di KSPN;

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu:

1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi Tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum.
2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service.
3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Barang Umum yaitu:

1. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik;
2. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/demand yang cukup besar;
3. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS.

Keberhasilan Ketersediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berhasil dicapai sampai dengan Tahun 2024 yaitu :

1. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan event MotoGP dengan melakukan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Mandalika melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali dengan melakukan Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema Buy The Service di Denpasar melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Penentuan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional;
4. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas.

- Narasi Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam Terminal Penumpang Tipe A antara lain:

1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A.
2. Terdapat backlog kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan.
3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam Terminal Barang Umum antara lain (3 point):

1. Terdapat kendala operasional kendaraan barang belum masuk ke terminal dikarenakan kesepakatan dengan negara lain masih dalam proses administrasi, pembangunan jalan khusus belum selesai dibangun dan penetapan pengelola yang terkendala masalah lahan.
2. Terdapat backlog kegiatan pembangunan Terminal Barang Untuk Umum lanjutan karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan tidak dapat dilaksanakan pada semua terminal yang belum selesai dibangun.
3. Operasional kendaraan barang masuk ke Terminal Barang Untuk Umum tergantung pada kesepakatan antara 2 negara terkait Standar Operasional Prosedur ekspor-impor komoditi.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda antara lain:

1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan;
2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung;
3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda

- **Narasi Realisasi Kinerja**

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan merupakan perbandingan Jumlah KSN Prioritas yang telah terlayani prasarana transportasi jalan pada Kawasan Prioritas Nasional terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

Sehingga:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun}(n)(10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN})}{\text{yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}} \\ & = \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang ditetapkan}}{\text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{44 \text{ wilayah (irisasi simpul TTA \& faspim yang terlayani)}}{69 \text{ wilayah KSN}} = 0,64 \end{aligned}$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target PK Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,64}{0,64} \times 100\% = 100,00\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah sebagai berikut:

Tabel II 4 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				
IKK 1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan 1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan;	Rp865.307.000,00	Rp865.307.000,00	Rp270.854.096,00	31,30%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan percepatan pengawasan kegiatan pembangunan pada simpul-simpul prasarana transportasi Jalan;
2. Mengusulkan kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan target pada sasaran strategis yang telah ditetapkan;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.1.2 IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 5 Capaian Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Satuan: Lokasi
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2024
Target	111	
Realisasi	108	
Capaian	97,30%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang adalah jumlah terminal tipe A dan terminal barang di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Terminal tipe A dan terminal barang kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah terminal tipe A dan terminal barang yang telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan aset lahan serta bangunannya telah menjadi milik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Untuk menghitung IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah TTA \& TB yang beroperasi} \\ & = \text{Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang Beroperasi} + \text{Jumlah Terminal Barang Umum yang beroperasi} \end{aligned}$$

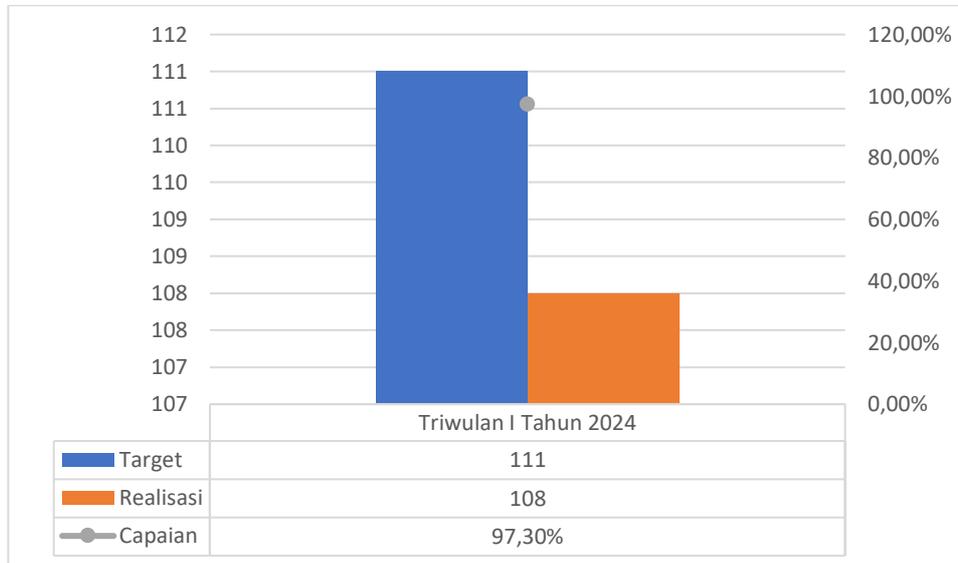
Keterangan :

* TTA = Terminal Tipe A

TB = Terminal Barang

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 108 lokasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 111 lokasi maka capaian kinerja mencapai 97,30%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.2**. Grafik Capaian IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi.



Gambar II 2 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Tahun 2024)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Terminal Penumpang Tipe-A

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia dan KM 100 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia, jumlah Terminal Penumpang Tipe A adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) terminal dengan rincian eksisting sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. 113 (seratus tiga belas) Terminal Penumpang Tipe A telah serah terima operasional yang menjadi kewenangan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - a. 108 Terminal Penumpang Tipe A telah beroperasi
 - b. 6 Terminal Penumpang Tipe A belum beroperasi, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) Terminal Penumpang Tipe A masih dalam proses pembangunan dan revitalisasi yaitu:
 - Terminal Demak (Jawa Tengah)
 - Terminal Air Sebakul (Bengkulu)

- 2) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A belum dibangun (Terminal Singkawang, Kalimantan Barat);
 - 3) 1 Terminal Penumpang Tipe A kondisi bangunannya kurang terawat dan sedang dilakukan studi KPBU untuk pemanfaatan aset terminal tanpa menghilangkan fungsi pelayanan terminal (Terminal Betan Subing, Provinsi Lampung);
 - 4) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih terkendala mekanisme serah-terima aset dengan Pemerintah Daerah (Terminal Bangkalan, Jawa Timur).
- c. 4 (empat) Terminal Penumpang Tipe A menjadi kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan telah beroperasi (Terminal Pondok Cabe, Terminal Poris Plawad, Terminal Baranangsiang, Terminal Jatijajar);
 - d. 2 (dua) Terminal Penumpang Tipe A menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan telah beroperasi (Terminal Kalideres dan Terminal Kampung Rambutan);
 - e. 8 (delapan) Terminal Penumpang Tipe A belum diserahkan ke Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota serta Perusahaan Daerah (Terminal Padang Bulan, Terminal Gerbangsari, Terminal Induk Bekasi, Terminal Kalijaya Cikarang, Terminal Cicaheum, Terminal Sri Tanjung, Terminal Osowilangun, Terminal Daya).

Terminal Barang Untuk Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:

1. KP 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum dan Terminal Transit Penumpang di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran 2);
2. KM 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran 3);
3. KM 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran 4) dan;
4. KM 139 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum yang Berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua (Lampiran 5).

Berikut adalah jumlah Terminal Barang untuk umum sebanyak 7 Terminal, antara lain:

1. Entikong di Kalimantan Barat;
2. Skouw di Papua. (PKN Jayapura)
3. Aruk di Kalimantan Barat;
4. Nanga Badau di Kalimantan Barat;
5. Motaain di Nusa Tenggara Timur;
6. Motamasin di Nusa Tenggara Timur;
7. Wini di Nusa Tenggara Timur;

Rincian dari 7 (tujuh) Terminal Barang Untuk Umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) Terminal Barang Untuk Umum yaitu Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong yang sudah selesai dibangun pada tahun 2020, dengan kondisi tahun 2021 sudah ada operasional internal oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) akan tetapi belum ada pelayanan terhadap kendaraan barang baik kendaraan barang domestik maupun kendaraan barang internasional. Adapun kendala/masalah yang masih dihadapi Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong adalah sebagai berikut:

- a) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, agar bisa ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara (TPS), harus ada badan usaha pengelola TPS. Proses penetapan pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS) masih terkendala sertifikat lahan yang belum selesai diproses.
 - b) Proses sertifikat lahan di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sanggau dilakukan dalam beberapa tahap, saat ini telah selesai tahap 1 dengan terbitnya sertifikat a.n. Kementerian Perhubungan seluas 30.820 m² yang belum mencakup kelesuruhan dari tanah yang dimohonkan. Tahap 2 akan dilakukan pendaftaran hak atas tanah setelah hasil sidang sengketa keluar dan diketahui titik batasnya.
 - c) Dalam rangka persiapan operasional TBI sedang diajukan beberapa permohonan antara lain permohonan ulang Penetapan Kawasan Pabean kepada Menteri Keuangan, permohonan spesifikasi teknis alat pemindai barang untuk keperluan operasional ekspor-impor dan permohonan persetujuan sewa BMN kepada Kepala KPKNL Pontianak.
 - d) Beberapa kendala yang dihadapi terkait operasional antara lain belum lengkapnya fasilitas penunjang, SDM dan kompetensi personil, belum adanya pengaturan sirkulasi lalu lintas angkutan barang, belum terbangunnya jalur khusus (dedicated lane) menuju perbatasan dan belum tersusunnya SOP angkutan barang lintas batas negara.
2. Terdapat 2 (dua) Terminal Barang Untuk Umum yang baru selesai proses pembangunannya pada Tahun Anggaran 2022 dan sudah dialokasikan anggaran operasional untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu Terminal Barang Internasional (TBI) Skouw di Papua dan Nanga Badau di Kalimantan Barat.
 3. Terdapat 4 (empat) Terminal Barang Untuk Umum yang masih dalam proses pembangunan, yaitu Aruk di Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur, Motamasin di Nusa Tenggara Timur, dan Wini di Nusa Tenggara Timur.
- Narasi Kronologi Target
Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Tahun 2024 yang semula sebanyak 111 lokasi, berubah menjadi 105 lokasi karena pada awal Tahun 2024 belum ada penambahan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang baru yang beroperasi.
 - Narasi Faktor Keberhasilan
Keberhasilan terhadap kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Tahun 2024 yaitu:
Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu:
 1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi Tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 menjadi 107 Terminal untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum.

2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service..
3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Barang Umum yaitu:

1. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik;
2. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/demand yang cukup besar;
3. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS.

- **Narasi Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan**

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam Terminal Penumpang Tipe A antara lain:

1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A.
2. Terdapat backlog kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan.
3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam Terminal Barang Umum antara lain (3 point):

1. Terdapat kendala operasional kendaraan barang belum masuk ke terminal dikarenakan kesepakatan dengan negara lain masih dalam proses administrasi, pembangunan jalan khusus belum selesai dibangun dan penetapan pengelola yang terkendala masalah lahan.
2. Terdapat backlog kegiatan pembangunan Terminal Barang Untuk Umum lanjutan karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan tidak dapat dilaksanakan pada semua terminal yang belum selesai dibangun.
3. Operasional kendaraan barang masuk ke Terminal Barang Untuk Umum tergantung pada kesepakatan antara 2 negara terkait Standar Operasional Prosedur ekspor-impor komoditi.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi merupakan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

Sehingga: *Jumlah Terminal Penumpang Tipe A + Jumlah Terminal Barang Umum yang beroperasi (sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat)*

$$= 107 + 1$$

$$= 108 \text{ lokasi}$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Tahun 2024 terhadap target PK Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{108}{111} \times 100\% = 97,30\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang adalah sebagai berikut:

Tabel II 6 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				
IKK 2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	0%
'Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan				

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan percepatan pengawasan kegiatan pembangunan pada simpul-simpul prasarana transportasi Jalan;
2. Mengusulkan kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan target pada sasaran strategis yang telah ditetapkan;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.2.3 IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 7 Capaian Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	
IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Satuan: Lokasi
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2024
Target	13	
Realisasi	12	
Capaian	92,31%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk diakomodir akan dilayani meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar Kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari:

10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

1. KSPN Danau Toba;
2. KSPN Bangka Belitung;
3. KSPN Borobudur;
4. KSPN Bromo Tengger Semeru;
5. KSPN Mandalika;
6. KSPN Labuan Bajo;
7. KSPN Likupang;

8. KSPN Wakatobi;
9. KSPN Morotai;
10. KSPN Raja Ampat.

9 Kawasan Industri (KI)

1. KI Sei Mangkei;
2. KI Galang Batang;
3. KI Bintan Aerospace;
4. KI Sadai;
5. KI Ketapang
6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintan Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;

26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Maminasata;
36. Kendari;
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

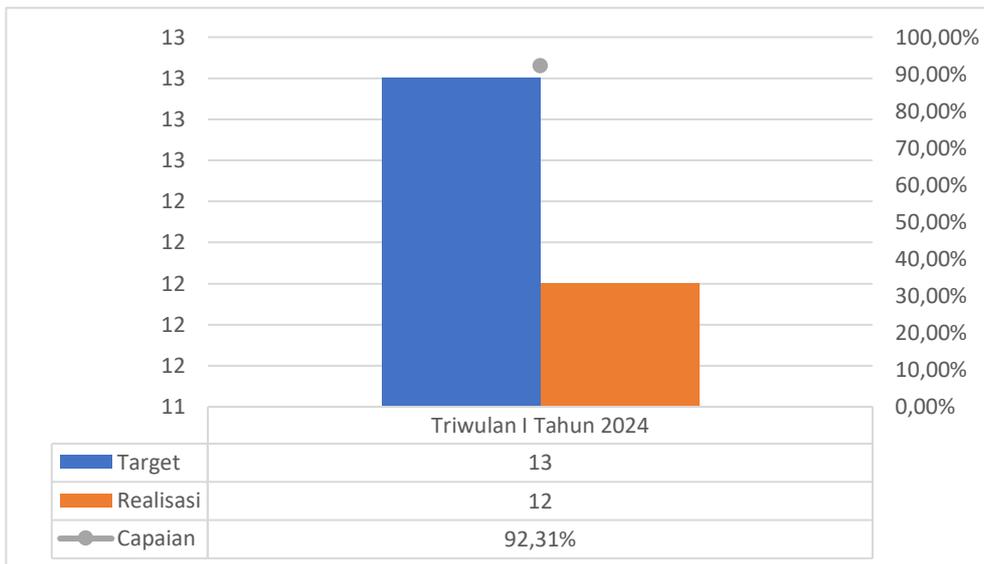
Untuk menghitung IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda} \\ = \text{Fasilitas Pendukung dan Integrasi moda yang sudah terbangun pada lokasi KSN Th 2020 s.d Th ke n}$$

Berdasarkan nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat pada Lampiran I Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, terdapat kesalahan/ ketidaksesuaian penulisan nomenklatur dimana indikator Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda memiliki satuan lokasi.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 12 lokasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 13 lokasi maka capaian kinerja mencapai 92,31%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.3**. Grafik Capaian IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda.



Gambar II 3 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Tahun 2024)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024;
2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024.

- **Narasi Kronologi Target**

Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda pada Tahun 2024 yang semula sebanyak 20 lokasi, berubah menjadi 13 lokasi karena sesuai dengan DIPA TA 2024, belum ada penambahan terkait penyediaan fasilitas pendukung & integrasi moda.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan target penyediaan fasilitas pendukung sampai dengan Tahun 2024 ada sebanyak 12 lokasi.

Penyediaan fasilitas pendukung sudah terealisasi di 12 (dua belas) lokasi, antara lain:

1. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika dan Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika (mendukung penyelenggaraan Moto GP tahun 2022);
2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang;
3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo;
4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta;

5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten;
6. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga;
7. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang;
8. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru;
9. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba;
10. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur;
11. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
12. Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema Buy The Service di Denpasar.

Keberhasilan Ketersediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berhasil dicapai sampai dengan Tahun 2024 yaitu :

1. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan event MotoGP dengan melakukan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Mandalika melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali dengan melakukan Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema Buy The Service di Denpasar melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Dalam pelaksanaannya sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan target penyediaan fasilitas pendukung Tahun 2024 sebanyak 12 lokasi, dapat terealisasi sebanyak 12 (dua belas) lokasi, yaitu Mandalika, Magelang, Purworejo, Surakarta, Klaten, Salatiga, Palembang, Pekanbaru, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Denpasar. Penambahan realisasi ada pada akhir tahun 2022, yaitu adanya penambahan pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo. Sehingga dari 12 (dua belas) lokasi penyediaan fasilitas pendukung pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, telah terealisasi sebanyak 12 (dua belas) lokasi yang berada di 8 Kawasan Strategis Nasional;
4. Penentuan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional;
5. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas.

- Narasi Faktor Kegagalan

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda antara lain:

1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan;
2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung;
3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

IKK Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda merupakan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang telah terbangun di wilayah kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Sehingga: } \textit{Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung \& Integrasi Moda} = \frac{\textit{Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang terbangun pada lokasi KSN Th 2020 s.d Th 2023}}{\textit{12 lokasi}}$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Triwulan I Tahun 2024 terhadap target PK Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \textit{Capaian} = \frac{12}{13} \times 100\% = 92,31\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II 8 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				
IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda				
Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.	Rp432.896.000,00	Rp432.896.000,00	Rp178.734.217,00	41,29%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan percepatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda pada lokasi yang sudah menjadi target pembangunan pada renstra;
2. Meningkatkan kegiatan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda serta Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.2 SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

• Uraian Kegiatan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat.

Tabel II 9 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1
SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00	
			Target	81,50
			Realisasi	95,60
			Capaian	117,30%
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,7	
			Target	53,75
			Realisasi	60,56
			Capaian	112,67%
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,6	
			Target	81,75
			Realisasi	82,44
			Capaian	100,84%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A.
2. IKK 2. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A
3. IKK 3. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

II.2.2.1 IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 10 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2024
Target	81,50	
Realisasi	95,60	
Capaian	117,30%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A merupakan rekapitulasi hasil Survey Koresponden pada Terminal Penumpang Tipe A melalui aplikasi *Case Management System* IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian survey dilakukan secara periodik setiap bulan oleh penumpang di seluruh Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah keewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dapat diakses melalui *barcode* ataupun *link* survey yang berbeda-beda setiap terminalnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai capaian kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh publik dimana nilai capaian / Indeks Kepuasan dimaksud diperoleh melalui pelaksanaan Survei yang disebut Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi darat adalah metode untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik transportasi darat, melalui Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A.

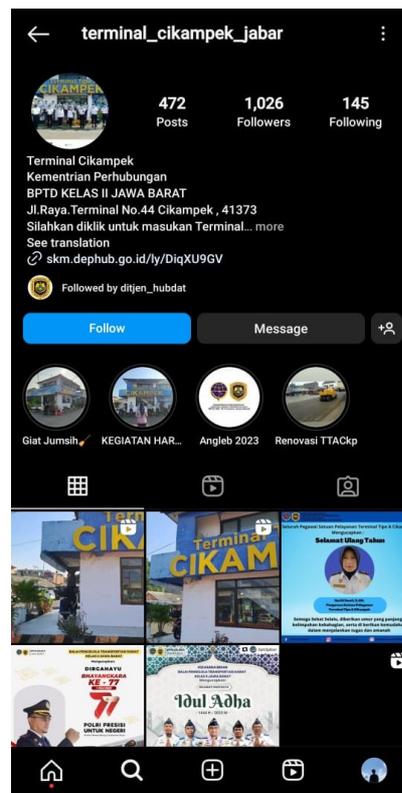
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terminal Tipe A menggunakan Proses perumusan Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Aspek Penilaian

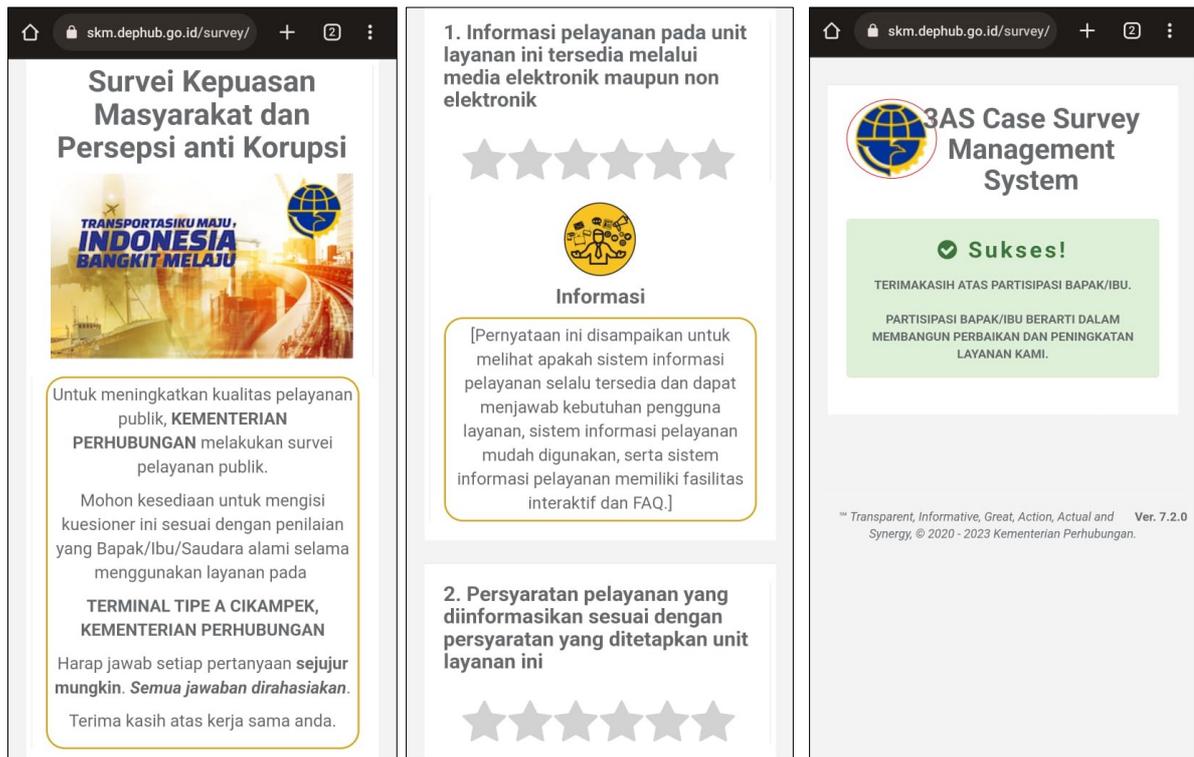
Penilaian publik atas penyelenggaraan transportasi darat melalui aplikasi 3A IPK-IKM atau Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat diakses melalui www.skm.dephub.go.id. Unsur penilaian SKM meliputi:

- 1) Persyaratan, Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 3) Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 4) Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- 5) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 6) Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 7) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
- 8) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- 9) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- 10) Sarana dan Prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Barcode untuk mengakses form survey disediakan oleh masing-masing Terminal Tipe A dengan cara di-display melalui poster dan/atau banner ataupun melalui link yang diberikan oleh petugas terminal kepada penumpang di terminal serta disebarakan melalui media sosial masing-masing terminal.



Pengisian survey dilakukan dengan cara mengisi data diri dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelayanan di terminal dengan memberikan rating dari 1 sampai 6, dengan rating 6 berarti paling memuaskan dan rating 1 paling tidak memuaskan.



Rekapitulasi hasil survey seluruh Terminal Tipe A dapat diakses melalui link skm.dephub.go.id dengan cara memasukkan username dan password yang telah terdaftar sebagai admin.



2. Pembobotan Nilai

Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan sebagai berikut:

Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan;
2. memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel II 1.1 Nilai Resepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Keterangan Tabel : Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

3. Parameter

Pada tahun 2022 Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan aplikasi 3A IPK-IKM dengan rumus hitung dan unsurnya sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Aplikasi 3A ditujukan untuk melakukan survei cepat penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan asumsi penentuan target yang merujuk pada target sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 menggunakan asumsi dari pemenuhan Dokumen Standar Pelayanan;
2. Pada tahun 2022 menggunakan asumsi telah dilaksanakan reviu dokumen Standar Pelayanan dan Penerapan SPBE;
3. Pada Tahun 2024 menggunakan asumsi pelaksanaan implementasi Road Map TIK untuk pelayanan; dan
4. Pada tahun 2024 menggunakan asumsi dari optimalisasi pelayanan pada penerapan SPBE.

Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Layanan dan dilakukan oleh Para Pengguna Layanan.

4. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan** atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \frac{\{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q\}}{\{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q\}}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja IKK Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 95,60% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 81,50% maka capaian kinerja mencapai 117,30%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.4**. Grafik Capaian IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A.



Gambar II 4 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area peningkatan pelayanan publik Tahun 2024, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan survey pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya Satuan Pelayanan Terminal Tipe A dengan menggunakan Aplikasi. Survey tersebut dilaksanakan untuk mengukur Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penggunajasa / stakeholders pada unit layanan Ditjen Perhubungan Darat yang mengacu pada kepada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

- **Narasi Kronologi Target**

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Terminal Tipe A memiliki target pada Tahun 2024 sebesar 81,00 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

Pada Tahun 2024 pelaksanaan SKM masih menggunakan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi 3A IPK-IKM dan masih berfokus pada pendampingan dan supervisi atas pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dimaksud kepada petugas layanan dan target Survei itu sendiri yaitu seluruh pengguna layanan. sehingga masih banyak kendala yang dihadapi baik dari sisi pemahaman petugas pelaksana layanan maupun dari sisi pemahaman pengguna jasa yang menyebabkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Terminal Tipe A Triwulan I Tahun 2024 sudah mencapai 95,60.

Capaian Nilai 95,60 diperoleh dari :

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A = Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A = 95,60

$$\frac{\text{Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terminal a+ Nilai IKM Terminal.....n}}{\text{Jumlah Terminal yang melakukan survey pada bulan ke-n}}$$

$$\frac{95,60}{1} = 95,60$$

Capaian 95,60 bila disesuaikan pada tabel range akan diperoleh predikat kinerja unit pelayanan pada tingkat Sangat baik. Berdasarkan jumlah terminal yang melakukan survey, hanya ditemukan 1 (satu) terminal dikarenakan sistem masih dalam perbaikan sejak bulan Juli 2023.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Perbaiki layanan antara lain perbaikan sarana dan prasarana;
2. Mensosialisasikan informasi terkait prosedur layanan dan produk layanan yang ada secara bertahap serta penerapan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;
3. Meningkatnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Terminal Tipe A Tahun 2024 Triwulan III menjadi 95,60;
4. Tersedianya Aplikasi 3A IPK-IKM untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa Terminal Tipe A.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Adapun beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

Dalam mencapai kinerja pelayanan Terminal Tipe A masih di temukan banyak permasalahan, sampai dengan Tahun 2024 masih belum sepenuhnya teratasi, adapun permasalahan yang banyak di temukan pada unit pelayanan publik sebagai berikut:

1. Persyaratan teknis maupun administratif yang dianggap belum memudahkan para pengguna layanan;
2. Prosedur yang dianggap tidak mudah untuk diikuti oleh pengguna layanan;
3. Layanan pengaduan yang masih belum tersedia;
4. Masih terdapat banyak satuan pelaksana yang belum melakukan survey IKM, sehingga hasil rekapitulasi yang diperoleh tidak maksimal.
5. Masih didapati pengguna jasa yang belum seluruhnya mendapatkan kualitas pelayanan yang baik salah satunya yaitu belum mendapatkan informasi secara lengkap terkait prosedur layanan serta petugas pelaksana belum sepenuhnya mendapatkan pemahaman secara lengkap terkait prosedur layanan serta penerapan pelaksanaan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;
6. Pada periode Juli s.d September 2023 Aplikasi 3A IPK-IKM masih dalam proses perbaikan sistem sehingga hanya satu satuan pelayanan terminal yang dapat terekam sistem.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A Triwulan I Tahun 2024 yang diisi oleh koresponden pada satuan pelayanan Terminal Tipe A yang beroperasi, melalui aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh hasil rekapitulasi rata-rata nilai IKM pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 95,60. Berdasarkan hasil rekapitulasi, pada Tahun 2024, dari 108 Terminal Tipe A yang beroperasi, terdapat 1 Terminal Tipe A yang melakukan survey IKM pada bulan September 2023.

Sehingga:

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A = Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A = 95,60

$$IKK_n = \frac{\sum IKM_{T1} + IKM_{T2} + \dots + IKM_{Tn}}{n}$$

$$IKKn = \frac{\text{Nilai IKM Terminal 1} + \text{Nilai IKM Terminal 2} + \text{Nilai IKM Terminal} \dots n}{\text{Jumlah Terminal yang melakukan survey pada bulan ke-n}}$$

$$\frac{95,60}{1} = 95,60$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A pada Triwulan I Tahun 2024 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{95,60}{81,50} \times 100\% = 117,30\%$$

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A adalah melalui Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A dengan anggaran senilai Rp0,00 dengan realisasi hingga akhir Tahun 2024 senilai Rp0,00 dikarenakan untuk IKK Indeks Kepuasan Masyarakat masih belum dianggarkan, karena untuk kegiatannya yaitu melakukan rekapitulasi hasil survey kinerja pelayanan melalui Aplikasi 3A IPK-IKM.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A agar secara rutin melakukan survey IKM dengan melakukan survey koresponden melalui Aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah disediakan dengan cara mengisi kuesioner melalui link dan scan QRcode yang telah disediakan.
2. Seluruh satpel Terminal Tipe A dapat melakukan survey koresponden secara rutin sehingga dapat mengetahui kondisi secara keseluruhan hasil dari survey IKM tersebut.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;
4. Berkoordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) saat ada kendala terkait aplikasi Aplikasi 3A IPK-IKM.

II.2.2.2 IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 12 Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2024
Target	53,75	
Realisasi	60,56	
Capaian	112,67%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

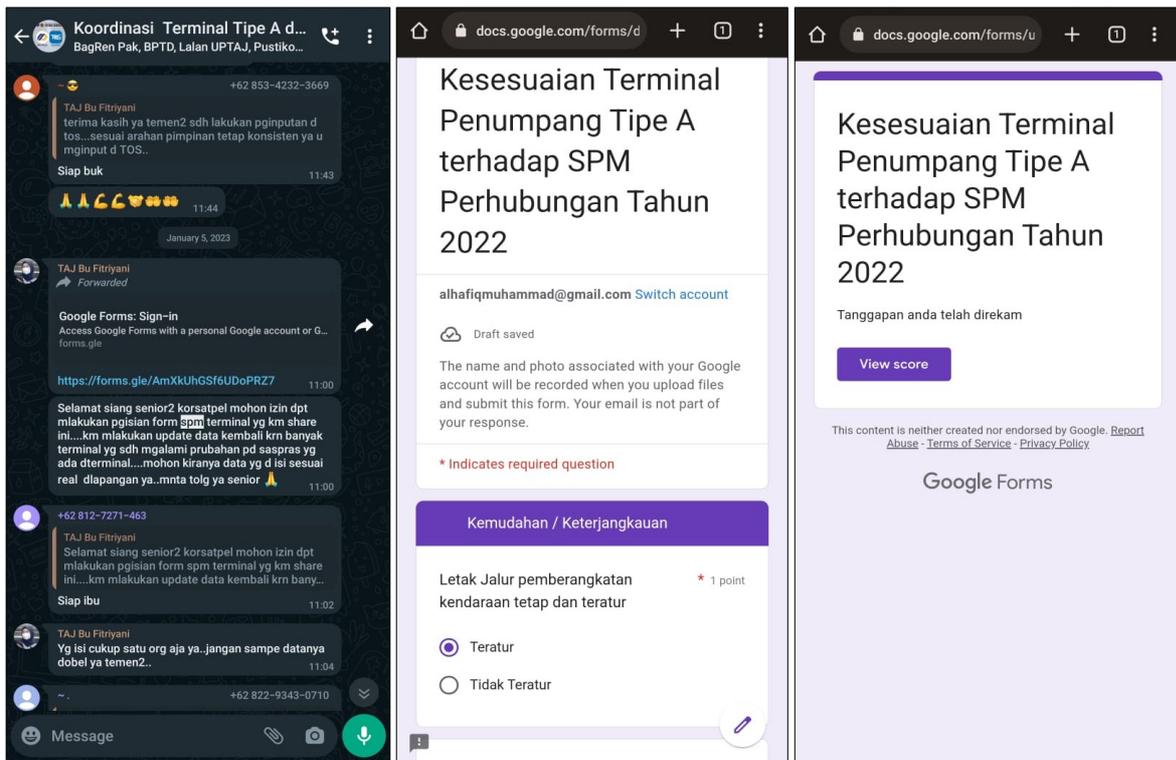
IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A adalah rata-rata dari persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada Terminal Penumpang Tipe A beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A didapatkan dari hasil survei penilaian pemenuhan jenis pelayanan yang diberikan nilai berdasarkan indikatornya dibandingkan dengan nilai maksimal yang bisa didapatkan jika semua jenis pelayanan terpenuhi indikatornya.

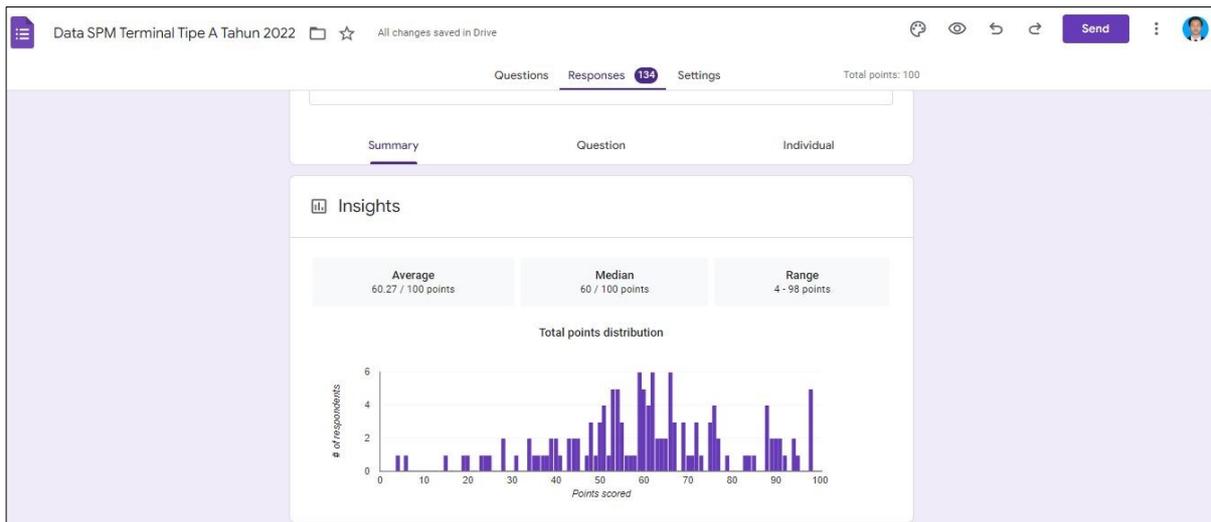
Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup:

- (1) Pelayanan Keselamatan;
- (2) Pelayanan Keamanan;
- (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan;
- (4) Pelayanan Kenyamanan;
- (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan;
- (6) Pelayanan Kesetaraan.

Survei pemenuhan Standar Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A dilakukan secara *online* dengan menyebar kuisioner *google form* ke seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



Pengisian kuisisioner dilakukan dengan menjawab pertanyaan terkait jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kondisi di terminal masing-masing. Rekapitulasi hasil pengisian kuisisioner seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat di akun *google drive* yang digunakan untuk membuat form kuisisioner.



8	<p>Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan)</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia</p> <p>Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
9	<p>Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
10	<p>Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP_{keamanan})		
1	<p>Fasilitas pencegah tindak kriminal</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
2	<p>Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
3	<p>Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP_{keandalan})		
1	<p>Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
2	<p>Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
3	<p>Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
4	<p>Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.</p>	2

	Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	
5	Ketersediaan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loker tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
6	Keteraturan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila Loker tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	1
7	Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai). Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.	2
9	Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP_{kenyamanan})		
1	Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.	2
3	Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2

4	Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyangang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyangang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
5	Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyangang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyangang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
6	Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
7	Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyangang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyangang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyangang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyangang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
11	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
16	Ketersediaan Area merokok (smoking area)	2

	Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
17	Ketersediaan Drainase yang memadai Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	Ketersediaan Ruang baca (reading corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP_{kemudahan})		
1	Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
4	Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
6	Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di tuang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca) Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah	2

	didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	
9	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca. Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
11	Ketersediaan Tempat penitipan barang Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
ASPEK PELAYANAN KESETARAAN (AP_{kesetaraan})		
1	Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	Ketersediaan Ruang ibu menyusui Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal		100

Sehingga :

$$SPM_{TTA} = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

Note:

*Monitoring dilaksanakan pada saat Proses rehabilitasi selesai dilaksanakan pada tahun (n)

SPM TTA = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing Terminal

Penumpang Tipe A (TTA) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat

n = Jumlah Terminal yang beroperasi

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A sebesar 60,56% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 53,75% maka capaian kinerja mencapai 112,67%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5**. Grafik Capaian IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A.



Gambar II 5 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum**

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dan Balai Pengelola Transportasi Darat telah melakukan revitalisasi terhadap Terminal Penumpang Tipe A sehingga mengakibatkan persentase SPM Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meningkat karena adanya penambahan dan perbaikan fasilitas umum dan penunjang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sebagai berikut :

Tabel II 14 Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015

Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:		
NO	ASPEK PENGUKURAN	NILAI (POINT)
ASPEK PELAYANAN KESELAMATAN (AP_{keselamatan})		
1	Lajur Pejalan Kaki Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan <i>crossing</i> dengan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

2	Fasilitas Keselamatan Jalan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Jalur Evakuasi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Alat Pemadam Kebakaran Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
5	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP_{keamanan})		
1	Fasilitas pencegah tindak kriminal Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP_{keandalan})		

1	<p>Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
2	<p>Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
3	<p>Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
4	<p>Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
5	<p>Ketersediaan Loket tempat calon penumpang membeli tiket</p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loket tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
6	<p>Keteraturan Loket tempat calon penumpang membeli tiket</p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila Loket tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	1
7	<p>Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
8	<p>Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai).</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.</p>	2
9	<p>Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
10	<p>Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2

ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP ^{kenyamanan})		
1	<p>Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)</p> <p>Dukungan pembaca layar diaktifkan.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)</p> <p>Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
2	<p>Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.</p>	2
3	<p>Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona)</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
4	<p>Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel).</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
5	<p>Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel).</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
6	<p>Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal)</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
7	<p>Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas)</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
8	<p>Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas)</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
9	<p>Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
10	<p>Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau.</p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
11	<p>Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan</p>	1

	Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
12	Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
16	Ketersediaan Area merokok (smoking area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
17	Ketersediaan Drainase yang memadai Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	Ketersediaan Ruang baca (reading corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP_{kemudahan})		
1	Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
4	Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur	1

	Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	
5	Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
6	Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca) Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca. Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
11	Ketersediaan Tempat penitipan barang Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
ASPE PELAYANAN KESETARAAN (AP_{kesetaraan})		
1	Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	Ketersediaan Ruang ibu menyusui Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1

Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal	100
--	-----

- Narasi Kronologi Target

Target SPM di Terminal Penumpang Tipe A Tahun 2024 sebesar 53,75% dikarenakan Terminal Penumpang Tipe A pada mulanya merupakan Terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sehingga kondisi Terminal berbeda-beda tergantung kemampuan daerah dalam mengelola dan merawat Terminalnya. Proses serah terima Terminal dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) dilaksanakan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018, sehingga kondisi awal Terminal yang diterima oleh Kementerian Perhubungan pada Tahun 2019 yaitu 53,54% sesuai dengan realisasi capaian SPM Terminal yang ada dilapangan pada saat itu yang merupakan rata-rata nilai SPM dari Terminal yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Seluruh Indonesia yang menjadi data dasar/baseline dikarenakan target SPM yaitu pemerataan untuk Terminal di seluruh Indonesia supaya target bersifat realistik.

Dikarenakan jumlah Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia berjumlah cukup banyak (lebih dari 100 Terminal) sehingga dalam meningkatkan jumlah rata-rata SPM 1% saja membutuhkan usaha yang tidak mudah. Target Tahun 2024 adalah 53,75% jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yaitu sebesar 53,70% mengalami kenaikan 0,05% dikarenakan pada Tahun 2024 Terminal yang menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah 111 Terminal sehingga untuk mencapai peningkatan rata-rata SPM di seluruh Indonesia sebesar 0,05% tersebut dibutuhkan beberapa Terminal untuk dilakukan rehabilitasi dalam 1 Tahun Anggaran untuk mencapai target tersebut.

Realisasi SPM Tahun 2024 adalah 60,56% dibandingkan Tahun 2023 dengan nilai 59,02% terdapat peningkatan sebesar 1,54%. Nilai persentase peningkatan tersebut terjadi dikarenakan terdapat kegiatan rehabilitasi/peningkatan Terminal Tahun Anggaran 2022 berjumlah 19 Terminal (Terminal Batoh, Terminal Lhokseumawe, Terminal Amplas, Terminal Tanjung Pinggir, Terminal Alang-Alang Lebar, Terminal Pakupatan, Terminal Banjar, Terminal Tingkir, Terminal Tegal, Terminal Bobotsari, Terminal Kebumen, Terminal Blitar, Terminal Tamanan, Terminal Kertonegoro, Terminal Samarinda Seberang, Terminal Puuwatu, Terminal Induk Lumpue, Terminal Isimu, Terminal Bolang Mongondow) dengan anggaran sebesar 12,86 Triliun. Dapat disimpulkan bahwa target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 dengan peningkatan sebesar 0,05% sudah cukup menantang, dikarenakan kegiatan rehabilitasi/peningkatan terminal membutuhkan anggaran yang besar.

Terminal yang direhabilitasi atau ditingkatkan tidak dapat memenuhi SPM 100% dikarenakan anggaran yang disetujui bukanlah sesuai kebutuhan capaian SPM 100% terminal, akan tetapi target minimal operasi Terminal sehingga masih ada beberapa item fasilitas SPM yang masih belum dapat dipenuhi.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A pada Tahun 2024 memiliki target sebesar 53,75 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan Terminal Tipe A sebanyak mungkin agar standar terminal bisa merata;
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training kepada Satuan Pelayanan Terminal;
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan prima pada Terminal melalui kegiatan *Excellent Service*;

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A masih di temukan banyak permasalahan, yang selama Tahun 2024 masih belum sepenuhnya teratasi, adapun permasalahan yang banyak di temukan sebagai berikut:

1. Terdapat backlog kegiatan, yang semula terencana menjadi tidak terlaksana;
2. Adanya kerusakan pada fasilitas fisik terminal karena kurang maksimalnya perawatan terminal;
3. Masih terdapat kekurangan SDM pada beberapa terminal.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A Tahun 2024, realisasi kinerja pada Triwulan I adalah sebesar 60,56 dengan target kinerja sebesar 53,75.

Sehingga:

SPM TTA

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

$$\text{realisasi} = \frac{6541}{108} \times 100\% = 60,56 \% \dots\dots \text{Lampiran 12}$$

Note:

*Monitoring dilaksanakan pada saat Proses rehabilitasi selesai dilaksanakan pada tahun (n)

SPM TTA = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A (TTA) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

n = Jumlah Terminal yang beroperasi

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A Triwulan I Tahun 2024 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{60,56}{53,75} \times 100\% = 112,67\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A Tahun 2024 adalah melalui :

Tabel II 15 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				
IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 3. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal.	Rp 38.860.346.000	Rp 38.860.346.000	Rp 2. 129.113.367	5,48%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat.
2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

II.2.2.3 IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 16 Capaian Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2024
Target	81,75	
Realisasi	82,44	
Capaian	100,84%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A adalah presentase penerapan digitalisasi di Terminal Penumpang Tipe A yang meliputi :

1. Presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System dengan bobot 74%;
2. Presentase terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate dengan bobot 8,4%;
3. Presentase terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV dengan bobot 17,6%.

Bobot nilai ditentukan berdasarkan fokus tujuan pada pelaporan data produksi secara online melalui system. Langkah tersebut merupakan langkah step by step menuju terminal yang smart melalui digitalisasi terminal. Latar belakang yang mendasari rumusan IKK tersebut yaitu karena terdapat perubahan pelaporan data produksi terminal yang semula dilaporkan secara manual kemudian direkap oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berubah menjadi input melalui sistem online sehingga sebagai tahap awal digitalisasi perencanaan 5 tahun melalui Rensta 2020 s.d. 2024 mengutamakan Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia untuk melaporkan data produksi secara online sehingga presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System berkontribusi paling besar yaitu dengan bobot 74%. SIASATI dapat diakses melalui <https://siasati.dephub.go.id/> .

Selanjutnya dalam rangka menuju terminal yang smart Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merencanakan akan mengaplikasikan digitalisasi terminal dengan memasang alat yang dapat mengirimkan data Terminal secara realtime yaitu mesin check in tiket, passenger gate, vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV. Akan tetapi karena besarnya jumlah Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia, sehingga pengaplikasian alat-alat tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga dalam indikator kinerja diberikan bobot penilaian sebesar 8,4% dan 17,6%. Vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV memiliki bobot yang lebih besar dikarenakan merupakan cerminan dari terminal data produksi Terminal yaitu kendaraan angkutan umum yang keluar masuk Terminal.

Presentase-presentase di atas didapatkan dari data jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang memenuhi masing-masing kriteria dibandingkan dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan pada saat ini Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia berada dalam kewenangan BPTJ (Pemerintah Pusat) untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah Bodetabek, kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah DKI Jakarta, kewenangan swasta dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk Terminal Penumpang Tipe A yang tidak diserahkan ke pemerintah pusat.

Presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System adalah perbandingan jumlah terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Jumlah terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System didapatkan dari data produksi yang di-input oleh petugas pencatat data kedatangan dan keberangkatan (*checker*) di masing-masing satuan pelayanan terminal tipe A yang beroperasi. Apabila data produksi tersebut telah masuk ke sistem SIASATI dan/atau TOS maka terminal tersebut telah dihitung melaporkan data produksi.

Presentase terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate adalah perbandingan jumlah terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Presentase terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV adalah perbandingan jumlah terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

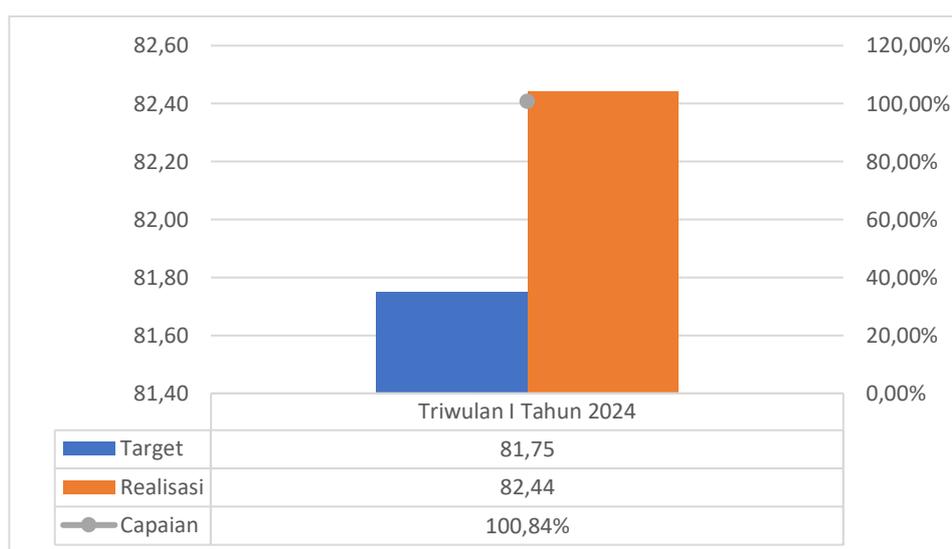
Pembobotan masing-masing data didasarkan pada rencana digitalisasi Terminal Penumpang Tipe A yang pada tahap awal akan lebih banyak berfokus pada pelaporan data produksi secara online melalui sistem yang telah dikembangkan yaitu SIASATI dan/atau Terminal Online System. Sedangkan untuk pemasangan mesin check in tiket dan passenger gate serta pemasangan vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV akan lebih banyak dilakukan pada digitalisasi tahap selanjutnya.

Untuk menghitung IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\%Penerapan\ Smart\ Terminal = \left[\frac{Jumlah\ TTA\ Yang\ Melaporkan\ Operasional\ Secara\ Online}{Jumlah\ TTA\ kewenangan\ Ditjen\ Hubdat\ yang\ Beroperasi} \times 74\% \right] + \left[\frac{Jumlah\ terminal\ dipasang\ mesin\ check\ in\ ticket\ dan\ passenger\ gate}{Jumlah\ TTA\ kewenangan\ Ditjen\ Hubdat\ yang\ Beroperasi} \times 8,4\% \right] + \left[\frac{Jumlah\ terminal\ dipasang\ vehicle\ gate,\ digital\ information,\ cctv}{Jumlah\ TTA\ kewenangan\ Ditjen\ Hubdat\ yang\ Beroperasi} \times 17,6\% \right]$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A sebesar 82,44% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 81,75% maka capaian kinerja mencapai 100,84%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.6**. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 3 Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A).



Gambar II 6 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 3 Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan:

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 9151 TAHUN 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3171 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Angkutan Jalan. (**Lampiran 13**)

• Narasi Kronologi Target

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada Tahun 2024 memiliki target 78,6 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan dalam mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan ini meliputi :

1. Menerapkan Terminal Online System (TOS) pada seluruh Terminal Tipe A;
2. Melakukan peningkatan SDM melalui training dan Bimtek terkait Terminal Online System (TOS);
3. Menambah biaya operasional pada satuan pelayanan untuk mendukung terlaksananya smart terminal sehingga persentase penerapan smart terminal dapat meningkat;

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Faktor yang dapat menghambat dalam mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan ini meliputi:

1. Adanya backlog kegiatan, yang semula terencana dalam Renstra tetapi menjadi tidak terlaksana;
2. Belum meratanya penerapan smart terminal pada Terminal Tipe A;
3. Masih kurangnya jumlah SDM yang mampu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait Smart Terminal maupun Terminal Online System (TOS).

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berikut adalah perhitungan realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2024 :

$$\begin{aligned} \%Penerapan\ Smart\ Terminal &= \left[\frac{\text{Jumlah TTA Yang Melaporkan Operasional Secara Online}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 74\% \right] + \\ &\left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 8,4\% \right] \\ &+ \\ &\left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information, cctv}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 17,6\% \right] \\ &= \left[\frac{117}{107} \times 74\% \right] + \left[\frac{9}{107} \times 8,4\% \right] + \left[\frac{5}{107} \times 17,6\% \right] \\ &= 82,44\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Penerapan Smart Terminal dibagi menjadi 3 bagian, antara lain :

1. Persentase dari Jumlah Terminal Tipe A Yang Melaporkan Operasional Secara Online dengan bobot 74%
2. Persentase dari Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate dengan bobot 8,4%
3. Persentase dari Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information dan CCTV dengan bobot 17,6%

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2024 terhadap target PK Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{82,44}{81,75} \times 100\% = 100,84\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II 17 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				
IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Bimtek Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan; 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan;	Rp 507.638.000	Rp 507.638.000	Rp 193.505.740	38,12%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan mengoptimalkan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan penginputan data produksi terminal pada aplikasi SIASATI;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.3 SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

• Uraian Kegiatan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Tabel II 18 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1
SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat				
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	24	
		Target		24
		Realisasi		23,75
		Capaian		101,40%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

II.2.3.1 IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 19 Capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

SK 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2024
Target	24	
Realisasi	23,75	
Capaian	101,40%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah angkutan barang yang masuk ke UPPKB.

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi:

- a. tata cara pemuatan barang;
- b. dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- c. tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- d. dokumen Angkutan Barang;
- e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Untuk menghitung IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 23,75% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 24% maka capaian kinerja mencapai 101,04%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.7**. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan I Tahun 2024).



Gambar II 7 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan I Tahun 2024)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan menyatakan fungsi pengawasan pencatatan, pengawasan, dan penindakan angkutan barang di UPPKB dilakukan terhadap:

- a. tata cara pemuatan barang;
- b. dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- c. tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- d. dokumen Angkutan Barang;
- e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Pada Tahun 2024, sebanyak 82 UPPKB yang beroperasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 567 Tahun 2022 tentang Pengoperasian Fasilitas Penimbangan di Seluruh Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa dasar hukum yang mendukung indikator kinerja persentase pelanggaran pada UPPKB, meliputi:

1. Peraturan Direktur Jenderal Nomor SK. 736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
2. Peraturan Direktur Jenderal Nomor KP.4084/AJ.005/DRJD/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor
3. Peraturan Direktur Jenderal Nomor SK.5370/KP.108/DRJD/2017 tentang Kompetensi Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

- **Narasi Kronologi Target**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2024 memiliki target 24 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

- **Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

Berikut adalah beberapa faktor keberhasilan yang dapat mendukung dalam pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:

1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM);
2. Membuat outlook UPPKB;
3. Membuat Pedoman Teknis WIM;
4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Pelayanan UPPKB untuk dapat memenuhi capaian target persentase pelanggaran;
6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736;
7. Pengadaan WIM di UPPKB;
8. Melakukan pengawasan kepada Satpel UPPKB melalui adanya pelaporan data penimbangan secara periodik setiap bulan.

- **Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang menjadi penyebab kegagalan tercapainya IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat:

1. Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Adanya jaminan keselamatan petugas UPPKB;

3. Adanya gejolak di lingkungan masyarakat terhadap penindakan di UPPKB;
4. Masih terdapat beberapa UPPKB yang letaknya sulit untuk dijangkau oleh jaringan internet.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Triwulan I Tahun 2024, diperoleh realisasi sebesar 23,75% sehingga capaian kinerja pada Tahun 2024 telah mencapai target PK Tahun 2024.

Sehingga :

$$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\%$$
$$= \frac{49.954}{210.305} \times 100\% = 23,75\%$$

*semakin rendah persentase pelanggaran, semakin baik, semakin tinggi persentase pelanggaran, semakin buruk.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{24 - (23,75 - 24)}{24} \times 100\% = 101,40\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 adalah

Tabel II 20 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat				
IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu; 7. Pemeliharaan perangkat WDIM di Kulwaru; 8. Pemeliharaan perangkat WDIM di Losarang; 9. Pemeliharaan dan Penerimaan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Rp 15.455.892.000	Rp 15.455.892.000	Rp 343.811.441	2,22%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Mewujudkan Indonesia bebas ODOL dengan cara melakukan pemasangan fasilitas pendukung sistem jembatan timbang online, pengembangan integrasi JTO dengan sistem weight in motion dan sistem ETLLE milik Kepolisian;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan UPPKB terkait dengan pelanggaran ODOL;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.4. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- **Uraian Kegiatan**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;

Tabel II. 20 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1
SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	89	
		Target		89
		Realisasi		85
		Capaian		95,51%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.

II.2.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 21 Capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Satuan: Nilai
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2024
Target	89	
Realisasi	85	
Capaian	95,51%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat merupakan hasil kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan menggunakan uraian bobot menyesuaikan dengan target Ditjen Perhubungan Darat. Salah satu bobot yang mempengaruhi yaitu tingkat penyerapan Anggaran Satuan Kerja dengan menyesuaikan realisasi anggaran Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan;
- d) Aspek Hukum dan Kerjasama.

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Berikut adalah tabel perhitungan nilai bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:

Tabel II 22 Perhitungan Nilai Bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	35%	
	I SAKIP	20%	
a	Rencana Strategis (Renstra)	4	
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		
c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	
	Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
e	Input Aplikasi e-Performance	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III, II, I	2	

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 1 (satu) selesai > 55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	
b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	
c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	
B	Indeks Profesionalisme ASN	35%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	
2	Kompetensi	14	
3	Kinerja	11	
4	Disiplin	1,5	
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	30%	
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	
	Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap $\geq 100\%$		
	Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
	Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 sebesar 84 jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 88 maka capaian kinerja mencapai 95,45%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.8**. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024)



Gambar II 8 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

a) Aspek Perencanaan;

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.
- c) Aspek Keuangan;
Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

• **Narasi Kronologi Target**

Target pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat menggunakan dan mengacu target yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024.

• **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan telah diselesaikan secara tepat waktu;
2. Daya serap anggaran satuan kerja Triwulan I Tahun 2024 sudah mencapai 63,34%;
3. Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK) tahun 2021 dan 2022 sudah tuntas 100%.

• **Narasi Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang dapat menjadi potensi kegagalan tercapainya IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:

1. Pelaksanaan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu;
2. Daya serap anggaran satuan kerja masih dibawah 80%;
3. Pengelolaan dalam melakukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara masih kurang maksimal;
4. Masih terdapat Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK) yang belum tuntas.

• **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024, diperoleh realisasi sebesar 84 sehingga capaian kinerja pada Tahun 2024 telah sesuai dengan target PK Tahun 2024.

Sehingga :

Tabel II 23 Keberhasilan Capaian Indikator Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		35%	
	I	SAKIP	20%	
	a	Rencana Strategis (Renstra)	4	4
		Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥1 Januari)		

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI	
	c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	3
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	e	Input Aplikasi e-Performance	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III, II, I	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	4
		Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
	a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	4
	b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	4
	c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	4
	B	Indeks Profesionalisme ASN	35%	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	8,5
	2	Kompetensi	14	14
	3	Kinerja	11	11
	4	Disiplin	1,5	1,5
	C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	30%	
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	5
		Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap $\geq 100\%$		
		Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
		Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	8
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	6
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
			85

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{85}{89} \times 100\% = 95,51\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 adalah :

Tabel II 24 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW III	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				
IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana; 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan;	Rp 37.044.234.000	Rp 37.044.234.000	Rp 3.791.789.016	10,24%

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW III	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				
9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ; 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 14. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi; 15. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. 16. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 17. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 18. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 19. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait; 20. Inhouse Konsultan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan				

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW III	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				
21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional) 23. Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Transit System dan ITS IKN; 24. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2024, Angkutan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.				

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan dukungan teknis agar dapat mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan sesuai dengan target perjanjian kinerja dan rencana strategis serta dapat mendukung tercapainya program kegiatan sesuai dengan DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2023.
2. Meningkatkan kegiatan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan target waktu yang ditentukan.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
4. Meningkatkan pengusulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang tercatat pada SIMAK-BMN Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

II.2.5 SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

- **Uraian Kegiatan**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

Tabel II 25 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1
SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel				
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	
		Target		74
		Realisasi		72,38
		Capaian		97,81%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

II.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 26 Capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Satuan: Nilai
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2024
Target	73	
Realisasi	74,58	
Capaian	102,16%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum, sebagaimana dijelaskan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.
2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada stakeholders (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Sumber Data pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui hasil kuesioner sebagai berikut:

1. Hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Terhadap Kinerja Layanan Perkantoran yang ditujukan kepada setiap Pegawai yang bertempat di Kantor Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
2. Hasil kuesioner assessment (penilaian sendiri) yang ditujukan kepada internal sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Cara Menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui perhitungan sebagai berikut :

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Tabel II 27 Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10	
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8	
3	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III, dan IV diukur melalui kuesioner terlampir

FORM A1

**KUESIONER TINGKAT KEPUASAN
PENYELENGGARAAN PERKANTORAN**

SATUAN KERJA

NAMA :

JABATAN :

NIK :

A. PERKANTORAN

1. Berikut merupakan persepsi atas tingkat pelayanan Layanan Perkantoran, dengan indikator 1 (Tidak Nyaman/Baik), 2 (Kurang Nyaman/Baik), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/Baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN/URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						
5						
6						

Ket: diisi dengan tanda centang (✓) pada pilihan persepsi.

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisioner berikut :

FORM A1

**KUESIONER TINGKAT KEPUASAN
PENYELENGGARAAN PERKANTORAN**

SATUAN KERJA

NAMA :

JABATAN :

NIK :

A. PERKANTORAN

1. Berikut merupakan persepsi atas tingkat pelayanan Layanan Perkantoran, dengan indikator 1 (Tidak Nyaman/Baik), 2 (Kurang Nyaman/Baik), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/Baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN/URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						
5						
6						

Ket: diisi dengan tanda centang (✓) pada pilihan persepsi.

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

$$x = \frac{95}{89} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

$$x = \frac{54}{89} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata – rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

$$x = \frac{2,31}{5} \times 100\%$$

Note:

- *) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security
- ***) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (download) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor
- ***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 72,38 jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 74 maka capaian kinerja mencapai 97,81%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.9**. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024.



Gambar II 9 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat PrasaranaTransportasi Jalan merupakan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan memperhitungkan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Kegiatan yang termasuk dalam Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, yaitu kegiatan layanan perkantoran dan pengadaan belanja modal lainnya.

- **Narasi Kronologi Target**

Target pada IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 menggunakan dan mengacu target yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Melakukan survey tingkat kepuasan baik kepada pejabat, maupun staf terkait layanan perkantoran;
2. Meningkatkan ketersediaan pc/laptop dengan menyesuaikan jumlah pegawai;
3. Meningkatkan kecepatan internet (unduh) di kantor.
4. Meningkatkan kesadaran antar pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang dapat menjadi potensi kegagalan tercapainya IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024:

1. Ketersediaan PC/laptop masih belum sesuai dengan jumlah pegawai;
2. Kecepatan fasilitas unduh internet masih dibawah standar kecepatan internet;
3. Diperlukan kesadaran pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan oleh unit kerja.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024, diperoleh realisasi sebesar 85 sehingga capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 telah sesuai dengan target PK Tahun 2024.

Sehingga :

Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran

NO	URAIAN	BOBOT	HASIL PERHITUNGAN	NILAI	BULAN											
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%														
	1 Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10%	70,0	7,00	7,00	7,00	7,00									
	2 Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8%	70,0	5,60	5,60	5,60	5,60									
	3 Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7%	70,0	4,90	4,90	4,90	4,90									
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	70,0	17,50	17,50	17,50	17,50									
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%														
	1 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	106,74	21,35	22,09	21,35	21,35									
	2 Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	60,67	9,10	9,42	9,10	9,10									
	3 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	46,2	6,93	6,93	6,93	6,93									
TOTAL NILAI					72,38	73,44	72,38	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III, dan IV

1. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II = $70 \times 10\%$ (bobot) = **7**
2. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III = $70 \times 8\%$ (bobot) = **5,60**
3. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon IV = $70 \times 7\%$ (bobot) = **4,90**

Tingkat Kepuasan Staf = $70 \times 25\%$ = **17,50**

Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

$$x = \frac{95}{89} \times 100\%$$

$$X = 106,74 \times 20\% \text{ (bobot)} = \mathbf{21,35}$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

$$x = \frac{54}{89} \times 100\%$$

$$X = 60,67 \times 15\% \text{ (bobot)} = \mathbf{9,10}$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

$$x = \frac{2,31}{5} \times 100\%$$

$$X = 46,2 \times 15\% \text{ (bobot)} = \mathbf{6,93}$$

$$\text{Totak Nilai} = \mathbf{7,00 + 5,60 + 4,90 + 17,50 + 21,35 + 9,10 + 6,93 = 72,38}$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 terhadap target revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{72,38}{74} \times 100\% = 97,81\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 adalah :

Tabel II 28 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
WA. Program Dukungan Manajemen				
SK 1. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel				
IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Layanan Perkantoran	Rp 6.291.088.000	Rp 6.291.088.000	Rp 1.786.084.402	28,39%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan layanan perkantoran;
2. Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target rencana penarikan dana yang ada.
3. Meningkatkan pengawasan pada kegiatan layanan perkantoran.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2024

II.3.1.1 Pagu Anggaran

a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024

1) Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp 99.957.401.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II 29 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024

RM	Rp.	99.957.401.000	100,00%
PNBP	Rp.	0	0,00%
SBSN	Rp.	-	0,00%
Total	Rp.	99.957.401.000	100%

Total Pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan per Sumber Dana pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp99.957.401.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II 30 Rincian per Sumber Dana Pagu Triwulan I TA. 2024

RM	Rp.	99.957.401.000	100,00%
PNBP	Rp.	0	0,00%
SBSN	Rp.	0	0,00%
Total	Rp.	99.957.401.000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp 99.957.401.000,-** dengan rincian per Jenis Belanja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II 31 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp.	-	0,00%
Belanja Barang	Rp.	88.063.401.000	88,10%
Belanja Modal	Rp.	11.894.000.000	11,90%
Total	Rp.	99.957.401.000	100%

Total Pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan per Jenis Belanja Triwulan I T.A. 2024 adalah sebesar **Rp 99.957.401.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II 32 Rincian per Jenis Belanja Pagu Triwulan I TA. 2024

Belanja Pegawai	Rp.	-	0,00%
Belanja Barang	Rp.	88.548.401.000	88,59%
Belanja Modal	Rp.	11.409.000.000	11,41%
Total	Rp.	99.957.401.000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Pada Triwulan I Tahun 2024 terdapat revisi anggaran pada Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berupa Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.002/1/17/SKJ/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran berupa *Automatic Adjustment* Belanja di Lingkungan Ditjet Perhubungan Darat T.A. 2024.

II.3.1.2. Refocussing/Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2024

Terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sesuai surat DJA sebagai berikut:

1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.002/1/17/SKJ/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran berupa *Automatic Adjustment* Belanja di Lingkungan Ditjet Perhubungan Darat T.A. 2024;
2. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KU.002/2/SDPTJ/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan.
3. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KU.002/48/SDPTJ/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Pada Tahun 2024 terdapat revisi Revisi Anggaran dengan pagu anggaran menjadi sebesar Rp 85.443.764.000,00.

Tabel II 33 Histori Revisi Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2024

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	78.052.162.000	9.400.000.000	-	87.452.162.000
REVISI KE-1	78.052.162.000	9.400.000.000	-	87.452.162.000
REVISI KE-2	76.043.764.000	9.400.000.000	-	85.443.764.000
REVISI KE-3	-	-	-	-
REVISI KE-4	-	-	-	-

Tabel II 34 Histori Revisi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	-	88.063.401.000	11.894.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-1	-	86.798.401.000	13.159.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-2	-	86.798.401.000	13.159.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-3	-	86.798.401.000	13.159.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-4	-	88.548.401.000	11.409.000.000	99.957.401.000

Tabel II 35 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	88.063.401.000	485.000.000	88.548.401.000
Belanja Modal	11.894.000.000	485.000.000	11.409.000.000
TOTAL	99.957.401.000	-	99.957.401.000

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	-	88.548.401.000	88.548.401.000
· RM	88.063.401.000	485.000.000	88.548.401.000
· PNBP			
Belanja Modal	-	11.409.000.000	11.409.000.000
· RM	11.894.000.000	485.000.000	11.409.000.000
· PNBP			
· SBSN			
TOTAL	-	99.957.401.000	99.957.401.000

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi).

Tabel II 36 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.080.313.000	77.080.313.000	6.407.807.877	11,15%
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	38.406.000.000	2.097.464.000	5,46%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.674.313.000	4.310.343.877	11,15%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	22.877.088.000	22.877.088.000	2.286.084.402	9,99%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.877.088.000	2.286.084.402	9,99%
GRAND TOTAL		99.957.401.000	99.957.401.000	8.693.892.279	8,70%

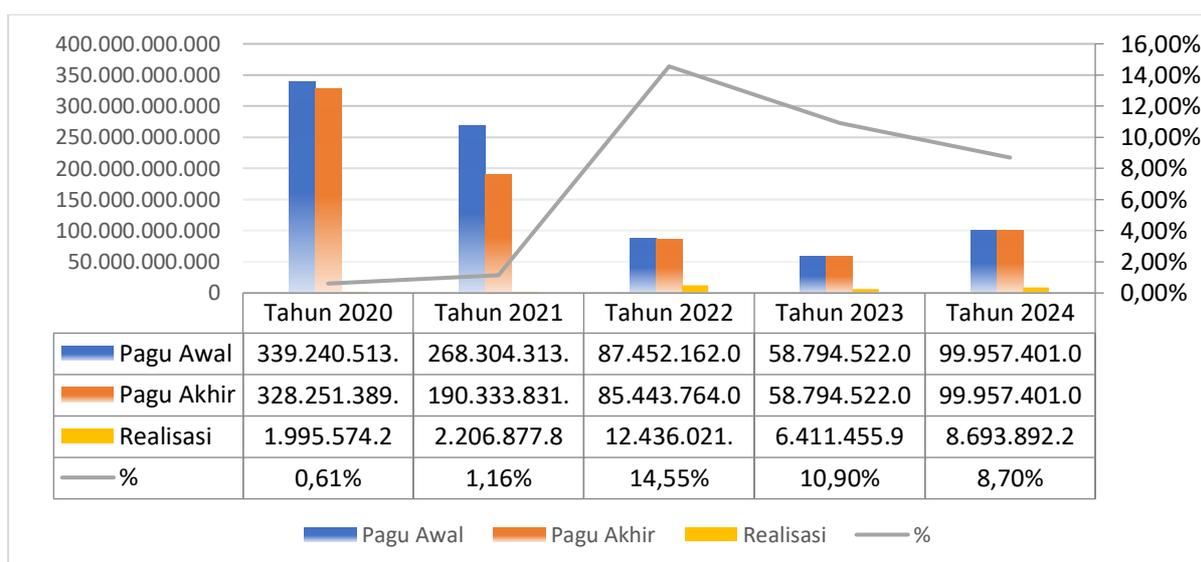
Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

II.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 37 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024 (Triwulan I)

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	339.240.513.000	328.251.389.000	1.995.574.265	0,61%
2	2021	268.304.313.000	190.333.831.000	2.206.877.874	1,16%
3	2022	87.452.162.000	85.443.764.000	12.436.021.120	14,55%
4	2023	58.794.522.000	58.794.522.000	6.411.455.940	10,90%
5	2024	99.957.401.000	99.957.401.000	8.693.892.279	8,70%



Gambar II 10 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap pada Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp 1.995.574.265,- atau mencapai 0,61% dari pagu akhir Rp 328.251.389.000,-. Sedangkan pada tahun 2021 tingkat serapan anggaran Triwulan I Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 2.206.877.874,- atau mencapai 1,16% dari pagu akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp 190.333.831.000,-. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat serapan anggaran Triwulan I Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 12.436.021.120,- atau mencapai 14,55% dari pagu akhir tahun 2022 yaitu sebesar Rp 85.443.764.000,-. Pada Tahun 2023 tingkat serapan anggaran Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 6.411.455.940,- atau mencapai 10,90% dari pagu akhir Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 58.794.522.000,-. Pada Tahun 2024 tingkat serapan anggaran Triwulan I Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 8.693.892.279,- atau mencapai 8,70% dari pagu akhir Triwulan I Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 99.957.401.000,-.

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II 38 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.080.313.000	77.080.313.000	6.407.807.877	11,15%
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	38.406.000.000	2.097.464.000	5,46%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.674.313.000	4.310.343.877	11,15%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	22.877.088.000	22.877.088.000	2.286.084.402	9,99%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.877.088.000	2.286.084.402	9,99%
GRAND TOTAL		99.957.401.000	99.957.401.000	8.693.892.279	8,70%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 8.693.892.279,- atau sebesar 8,70%.

II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja dan Per Jenis Sumber Dana Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2024 yang sudah di analisis per Triwulan I, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 39 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	88.548.401.000	6.754.478.120	7,63%
3	Belanja Modal	11.409.000.000	1.939.414.159	17,00%
TOTAL		99.957.401.000	8.693.892.279	8,70%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2024 dari Triwulan I sebesar Rp 8.693.892.279,00 atau sebesar 8,70%.

Tabel II 40 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	99.957.401.000	8.693.892.279	8,70%
2	PNBP	0	-	0,00%
3	SBSN	-	-	0,00%
TOTAL		99.957.401.000	8.693.892.279	8,70%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2024 dari Triwulan I sebesar Rp 8.693.892.279,- atau sebesar 8,70%.

II.3.2.3 Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Dari total pagu anggaran Triwulan I Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp. 99.957.401.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Seribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp. 8.693.892.279,- (Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Sembilan Rupiah) atau sebesar 8,70%. Pada Triwulan I Tahun 2024.

Tabel II 41 Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA
		99.957.401.000	8.693.892.279	91.263.508.721
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana	0	0	0
2	Kegiatan yang Terblokir	0	0	0
3	Kontraktual	80.936.000.000	2.611.419.960	78.324.580.040
	a. Belanja Barang	69.527.000.000	893.964.000	68.633.036.000
	b. Belanja Modal	11.409.000.000	1.717.455.960	9.691.544.040
4	Non Kontraktual	19.021.401.000	6.082.472.319	12.938.928.681
	a. Belanja Barang	19.021.401.000	6.082.472.319	12.938.928.681
	b. Belanja Modal	-	-	-
5	Sisa Belanja Pegawai	0	0	-
TOTAL		99.957.401.000	8.693.892.279	91.263.508.721

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II. 3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan I Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II 42 Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Triwulan I		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)
1	SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	96,53%	9,10%	87,43%
2	SK2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	110,27%	8,10%	102,17%
3	SK3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	101,40%	2,13%	99,27%
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	95,51%	10,20%	85,31%
5	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	97,81%	13,95%	83,86%
Total		100,30%	8,70%	91,61%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,30%, dengan realisasi anggaran sebesar 8,70% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 91,61%.

II. 3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel II 43 Perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

No	Sasaran Kegiatan	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	% Capaian SDM	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	Efisiensi (posisi Triwulan I)
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	25	20	80%	96,53%	16,53%
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25	15	60%	110,27%	50,27%
3	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	25	16	64%	101,40%	37,40%
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	30	28	93%	95,51%	2,18%
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	20	10	50%	97,81%	47,81%
Total		125	89	69%	100,30%	30,84%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Triwulan I sebesar 100,30%, dengan Capaian Sumber Daya Manusia menunjukkan adanya efisiensi Sumber Daya Manusia sebesar 30,84%, dimana walaupun masih ada kekurangan Sumber Daya Manusia tetapi masih bisa mencapai target kinerja.

II.3.3.3 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024:

1. Terdapat *Automatic Adjustment* anggaran untuk kegiatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda Tahun Anggaran 2023 sehingga mengakibatkan tidak bertambahnya capaian kinerja indikator kinerja kegiatan Persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda.
2. Membutuhkan koordinasi yang lebih intens dan komprehensif dengan stakeholder terkait agar kegiatan monitoring atau evaluasi menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi kinerjanya maupun realisasi anggaran.
3. Berdasarkan hasil review secara periodik, dibutuhkan adanya monitoring kinerja dan evaluasi kegiatan sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.

The page features several decorative geometric elements: an orange L-shaped line in the top-left corner; a cluster of overlapping orange, blue, and grey shapes in the top-right; a cluster of overlapping blue, grey, and orange shapes in the bottom-left; and a dark blue L-shaped line in the bottom-right corner.

BAB III

PENUTUP

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

Dalam Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis tersebut, maka dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024, terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SK \geq 100\%$) dan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq SK < 100\%$).

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2024, Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari **9 (sembilan)** IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat **5 (lima)** IKK dengan **status hijau** dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan **4 (empat)** **status merah** dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$):

1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terealisasi **0,64** (target tahun 2024 sebesar 0,64), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **95,6%** (target tahun 2024 sebesar 81,5) dengan Capaian Kinerja sebesar **117,30%**;
3. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **60,56%** (target tahun 2024 sebesar 53,75%), dengan capaian kinerja sebesar **112,67%**;
4. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terealisasi **82,44%** (target tahun 2024 sebesar 81,75%), dengan capaian kinerja sebesar **100,84%**;
5. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terealisasi sebesar **23,75%** (target tahun 2024 sebesar 24%), dengan capaian kinerja sebesar **101,40%**.

Indikator Kinerja Kegiatan dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$) :

1. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebesar **108** lokasi (target tahun 2024 sebesar 111 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **97,30%**;
2. Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi sebesar **12** lokasi (target tahun 2024 sebesar 13 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **92,31%**;
3. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar **84** (target tahun 2024 sebesar 88), dengan capaian kinerja sebesar **95,45%**;

4. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terealisasi **72,38** (target tahun 2024 sebesar 74), dengan capaian kinerja sebesar **97,81%**;

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran Kinerja adalah sebesar **100,30%** dan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah sebesar **101,68%**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala.

Total pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Triwulan I T.A. 2024 adalah sebesar Rp 99.957.401.000 dengan realisasi anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Triwulan I Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 8.693.892.279 (8,70);

1. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - b. Melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka penyerapan realisasi anggaran;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
 - d. Memaksimalkan peran SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi demi tercapainya target capaian kinerja.

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,62	0,62	100,00%	0,62	0,62	100,00%	0,62	0,62	100,00%	TERCAPAI	Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105	105	100,00%	105	107	101,90%	105	108	102,42%	TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan operasional Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Barang untuk Umum melalui: 1. Konsistensi jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi Tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu sebesar 105 Terminal. 2. Menetapkan lokasi terminal tipe A dan Terminal Barang Untuk Umum baru sesuai dengan skala prioritas berdasarkan hasil pengkajian lebih lanjut; 3. Meningkatkan kegiatan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A. 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 5. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik; 6. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/demand yang cukup besar. 7. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Lokasi	12	12	100,00%	12	12	100,00%	12	12	100,00%	TERCAPAI	1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
																4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.		
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00	81,00	93,64	115,60%	81,00	93,19	115,05%	81,00	97,54	120,42%	TERCAPAI	Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terkait pelayanan terminal melalui : 1. Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya. 2. Tersedianya aplikasi Aplikasi 3A IPK-IKM untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa Terminal Tipe A. 3. Perbaikan layanan antara lain perbaikan sarana dan prasarana; 4. Mensosialisasikan informasi terkait prosedur layanan dan produk layanan yang ada secara bertahap serta penerapan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,7	53,7	59,02	109,91%	53,7	59,02	109,91%	53,7	59,02	109,91%	TERCAPAI	Mengoptimalkan fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A melalui : 1. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan Terminal Tipe A sebanyak mungkin agar standar terminal bisa merata; 2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training kepada Satuan Pelayanan Terminal; 3. Melaksanakan kegiatan pelayanan prima pada Terminal. 4. Melakukan evaluasi paruh waktu renstra.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,6	78,6	83,41	106,12%	78,6	81,75	104,01%	78,6	81,75	104,01%	TERCAPAI	Meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal meliputi: 1. Menerapkan Terminal Online System (TOS) pada seluruh Terminal Tipe A; 2. Melakukan peningkatan SDM melalui training dan Bimtek terkait Terminal Online System (TOS); 3. Menambah biaya operasional pada satuan pelayanan untuk mendukung terlaksananya smart terminal sehingga persentase penerapan smart terminal dapat meningkat.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
4	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	25	25	31,69	73,24%	25	29,41	82,36%	25	24,99	100,04%	TERCAPAI	Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM); 2. Sudah terdapat konsep outlook UPPKB; 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR DRJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Sudah terdapat konsep Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Pelayanan UPPKB untuk dapat memenuhi capaian target persentase pelanggaran; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736; 7. Melakukan pengawasan kepada Satpel UPPKB melalui adanya pelaporan data penimbangan secara periodik setiap bulan.	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
5	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis	Nilai	88	88	83	94,32%	88	83	94,32%	88	84	95,45%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan cara: 1. Pada aspek perencanaan akan melaksanakan penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan secara tepat waktu;	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)		
		Transportasi Darat		Transportasi Darat											<ul style="list-style-type: none"> 2. Pada aspek kepegawaian, melakukan <i>updating</i> sistem kepegawaian, membuat laporan bulanan kinerja pegawai setiap bulan melalui AP2Kp, dan membuat penilaian kinerja pegawai setiap akhir tahun. 3. Pada aspek keuangan, melakukan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan rapat Kemajuan Realisasi Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang rutin dilaksanakan pada hari senin. 	<ul style="list-style-type: none"> an Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha 		
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	73	74,58	102,16%	73	74,98	102,72%	73	75,39	103,27%	TERCAPAI	<p>Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengadaan PC dan Printer pada Tahun Anggaran 2023; 2. Menambah kecepatan jaringan internet untuk memudahkan kegiatan layanan perkantoran. 	<ul style="list-style-type: none"> Subbag Tata Usaha

The page features several large, overlapping geometric shapes in shades of orange, blue, and grey. In the top-left corner, there is an orange L-shaped graphic. In the top-right corner, there is a cluster of overlapping shapes in orange, dark blue, and grey. In the bottom-left corner, there is another cluster of overlapping shapes in blue, dark blue, and orange. In the bottom-right corner, there is a dark blue L-shaped graphic.

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar II 1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	20
Gambar II 2 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Tahun 2024)	28
Gambar II 3 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Tahun 2024)	37
Gambar II 4 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A).....	46
Gambar II 5 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A).....	58
Gambar II 6 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 3 Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A)	69
Gambar II 7 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan I Tahun 2024)	73
Gambar II 8 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024)	80
Gambar II 9 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024)	91
Gambar II 10 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel I 1	Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	4
Tabel I 2	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024.....	10
Tabel I 3	Rencana Kinerja Tahunan 2024	11
Tabel I 4	Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024.....	12
Tabel II 1	Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024	16
Tabel II 2	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	17
Tabel II 3	Capaian Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	18
Tabel II 4	Realisasi Anggaran.....	17
Tabel II 5	Capaian Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi.....	27
Tabel II 6	Realisasi Anggaran.....	33
Tabel II 7	Capaian Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	34
Tabel II 8	Realisasi Anggaran.....	28
Tabel II 9	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	41
Tabel II 10	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A.....	42
Tabel II 11	Nilai Resepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan	45
Tabel II 12	Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	50
Tabel II 13	Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015.....	52
Tabel II 14	Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan	58
Tabel II 15	Realisasi Anggaran	66
Tabel II 16	Capaian Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A.....	67
Tabel II 17	Realisasi Anggaran	71
Tabel II 18	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	72
Tabel II 19	Capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	72
Tabel II 20	Realisasi Anggaran	76
Tabel II 21	Capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	77
Tabel II 22	Perhitungan Nilai Bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	78
Tabel II 23	Keberhasilan Capaian Indikator Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	81
Tabel II 24	Realisasi Anggaran	84
Tabel II 25	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	87
Tabel II 26	Capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.....	87
Tabel II 27	Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	88
Tabel II 28	Realisasi Anggaran	94
Tabel II 29	Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024	95
Tabel II 30	Rincian per Sumber Dana Pagu Triwulan I TA. 2024	95
Tabel II 31	Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024	95

Tabel II 32	Rincian per Jenis Belanja Pagu Triwulan I TA. 2024.....	95
Tabel II 33	Histori Revisi Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2024	96
Tabel II 34	Histori Revisi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024	96
Tabel II 35	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024	97
Tabel II 36	Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2024	98
Tabel II 37	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024 (Triwulan I)	99
Tabel II 38	Kegiatan Program yang ada dalam DIPA.....	100
Tabel II 39	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I 2024	100
Tabel II 40	Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I 2024	101
Tabel II 41	Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja	101
Tabel II 42	Efisiensi Anggaran	102
Tabel II 43	Perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM	103